UNIVERSITAS
GADJAH MADA
POLITIK HUKUM KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
SARAH FURQONI, Andi Sandi A. T. T., S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
KATA PENGANTAR iv
INTISARI viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16

A. Politik Hukum 16
B. Lembaga Negara 20
C. Demokrasi dalam Pemilu 23
    1. Pengertian Demokrasi 23
    2. Hubungan Pemilu dan Demokrasi 26
D. Pemilihan Umum 28
    1. Pengertian Pemilihan Umum 28
    2. Sistem Pemilihan Umum 30
    3. Sejarah Singkat Pemilihan Umum di Indonesia 32

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
POLITIK HUKUM KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
SARAH FURQONI, Andi Sandi A. T. T., S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4. Tujuan dan Asas-Asas Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum.....35
E. Penyelenggara Pemilihan Umum.....38
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 39
2. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) 41
F. Etika Penyelenggara Pemilihan Umum 42
1. Pengertian Etika 43
2. Penegakkan Etika dan Sistem Etika.....44
3. Etika Penyelenggara.....45
G. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 48

BAB III METODE PENELITIAN 53

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian.....53
B. Jenis Data 56
C. Teknik Pengumpulan Data.....65
D. Jalannya Penelitian.....66
E. Analisis Data 67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 69

A. Analisis Politik Hukum Kewenangan DKPP dalam Perubahan Undang-Undnag tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 69
1. Kewenangan Dewan Kehormatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.....70
2. Kewenangan DKPP dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 80
3. Kewenangan DKPP dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....91
4. Perbandingan Perubahan Lembaga DKPP berdasarkan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 103
B. Analisis Politik Hukum Kewenangan DKPP dalam Menegakkan Kode Etik Penyelengga Pemilihan Umum Masa Mendatang.....113

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
POLITIK HUKUM KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
SARAH FURQONI, Andi Sandi A. T. T., S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1. Kewenangan DKPP dalam Pemberhentian Penyelenggara Pemilu dan Kewenangan DKPP berdasarkan Putusan MK 115
   a. Kewenangan DKPP dalam Pemberhentian KPU 115
   b. Kewenangan DKPP dalam Pemberhentian Bawaslu 117
   c. Kewenagan DKPP terkait Putusan Mahkamah Konstitusi 118
2. *Subjectum dan Objectum Litis* DKPP 128
3. Persidangan Kode Etik oleh DKPP 136
   a. Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum 136
      1) Persyaratan dan Tata Cara dalam Pengaduan atau Laporan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.....138
      2) Pengaduan Terkait Pemilukada Tahun 2012-2017, Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.....141
   b. Tahapan Pemeriksaan Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik 151
      1) Verifikasi Administrasi 151
      2) Verifikasi Materiil, Regsitrasi, dan Penjadwalan Sidang.....155
   c. Persidangan Kode Etik di DKPP.....156
      1) Tata Tertib dalam Persidangan.....157
      2) Tata Cara Sidang Pemeriksaan.....159
      3) Pelaksanaan Persidangan 161
      4) Sidang Pemeriksaan Daerah.....162
      5) Penetapan Putusan DKPP 167
      6) Hasil-Hasil Persidangan 169
4. Politik Hukum Kewenangan DKPP dalam Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Berintegritas 173

BAB V PENUTUP.....185

A. Kesimpulan 185

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
POLITIK HUKUM KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
SARAH FURQONI, Andi Sandi A. T. T., S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Saran.....186

DAFTAR PUSTAKA.....188